

## PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

**Moh. Rodiaminollah, Lu'lu' Nurul Qomariyah**

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang, IAIN Madura

Email: [rodiamin07@gmail.com](mailto:rodiamin07@gmail.com), [luluqomaria96@gmail.com](mailto:luluqomaria96@gmail.com)

### Abstrak

Salah satu pengoptimalan sumber daya guna menunjang pembangunan ekonomi suatu wilayah atau daerah dapat dilakukan dengan mengidentifikasi komoditi-komoditi pertanian sehingga rencana pembangunan ekonomi di sektor pertanian dapat di arahkan pada prioritas pengembangan komoditi pertanian. Dalam rencana pembangunan ekonomi, sektor pertanian masih menjadi andalan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup besar dibandingkan sektor-sektor lainnya dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini menjadikan peluang sektor pertanian memiliki pengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Untuk menjaga agar perencanaan pembangunan ekonomi dapat berjalan maka diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor pertanian guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal kebijakan pemerintah di sektor pertanian yaitu: 1) Kebijakan harga; 2) kebijakan perdagangan; 3) kebijakan subsidi; 4) kebijakan struktural; 5) kebijakan pengaturan; 6) kebijakan fasilitas; 7) kebijakan intervensi.

**Kata Kunci:** Sektor Pertanian, Pembangunan, Ekonomi.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan atas sumber daya alam yang sangat melimpah. Kekayaan sumber daya alam tersebut terdiri dari sumber daya air, sumber daya lahan, sumber daya hutan, sumber daya laut, maupun keanekaragaman hayati yang terkandung didalamnya dan tersebar luas di setiap pulau-pulau di Indonesia. Kekayaan yang dimiliki itu dapat menjadi modal bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Dalam rencana pembangunan ekonomi, sektor pertanian masih menjadi andalan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup besar dibandingkan sektor-sektor lainnya dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini menjadikan peluang sektor pertanian memiliki pengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor untuk menghasilkan output, maka pada proses ini akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Secara sederhana ukuran keberhasilan dihitung dari besar pengaruh pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian terhadap perekonomian suatu daerah. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor akan terus meningkat. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelum sebelumnya.

Sektor pertanian memiliki peranan yang strategis dalam struktur pembangunan perekonomian suatu negara.<sup>1</sup> Sektor pertanian ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dalam tujuan pembangunan ekonomi yang mapan. Mulai dari penyediaan lahan, teknologi, penanganan hama, menentukan pasar, proteksi, kredit hingga kebijakan lain. Perekonomian berbasis sektor pertanian menjadi pilihan motif kebangkitan ekonomi di dunia,

---

<sup>1</sup> Mi`Rojun Nurun Nadziroh, Peran Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Magetan, Jurnal AGRISTAN, Volume 2, Nomor 1, Mei 2020

selain membuat banyak inovasi di bidang teknologi industri, tetapi juga menjadikan sektor pertanian penunjang roda pembangunan di sektor riil dan memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Potensi pertanian di Indonesia sangatlah besar namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar dari petani masih banyak yang termasuk pada penduduk golongan miskin. Banyak hal yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam mengembangkan pertanian pada masa yang akan datang. Karena kesejahteraan petani dan keluarganya merupakan tujuan utama yang menjadi prioritas dalam melakukan program kemajuan sektor pertanian.

Tentu hal itu tidak hanya untuk menguntungkan *end user* atau produsen saja, namun diarahkan untuk mencapai dasar yang kuat pada pembangunan nasional. Pembangunan adalah penciptaan sistem dan tata nilai yang lebih baik hingga terjadi keadilan dan tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Pembangunan sektor pertanian harus mengantisipasi tantangan demokratisasi dan globalisasi untuk menciptakan atau menghadirkan sistem yang adil. Selain itu harus diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, khususnya petani melalui pembangunan sistem pertanian dan usaha pertanian yang kuat dan mapan, dimana sistem tersebut harus bisa bersaing, berkerakyatan, berkelanjutan.

## PEMBAHASAN

### Peranan sektor pertanian

Keberhasilan suatu usaha pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor.<sup>2</sup> Dari pengalaman pembangunan negara-negara yang sekarang sudah merupakan negara maju, keberhasilan pembangunan pada dasarnya dipengaruhi oleh dua unsur pokok yaitu unsur ekonomi (sumber daya alam, sumber daya manusia, pembentukan modal dan teknologi) dan non ekonomi (politik, sosial, budaya dan kebiasaan).

Pada umumnya pembangunan suatu negara itu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kearah yang lebih baik dan merata, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat yang bersangkutan dengan kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan yang relatif kecil. Tetapi realitanya berbeda dimana pemerataan dan kesenjangan tersebut berbeda-beda.<sup>3</sup>

Terdapat tiga tujuan pembangunan yang secara universal diterima sebagai prioritas dan mutlak untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar manusia di negara-negara sedang berkembang khususnya yaitu ketahanan pangan, penghapusan kemiskinan atau peningkatan kualitas hidup manusia, dan pembangunan desa berkelanjutan. Ketiga prioritas tujuan pembangunan tersebut saling berkaitan. Ketahanan pangan saling pengaruh mempengaruhi dengan kemiskinan maupun dengan membangun desa.<sup>4</sup>

### Pembangunan Ekonomi

Menurut Suryana, beberapa ekonomi membedakan pengertian pembangunan ekonomi atau *economic development* dengan pertumbuhan ekonomi atau *economic growth* dengan mengartikan istilah pembangunan ekonomi sebagai berikut:<sup>5</sup>

- Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan GDP/GNP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan penduduk, atau

<sup>2</sup> Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan : Problematikan dan Pendekatan*. Edisi Pertama, Jakarta : Salemba Empat. Hlm23

<sup>3</sup> Ropingi. 2002. *Identifikasi Komponen Pertumbuhan Sektor Pertanian*. Surakarta : Pradya Paramitha. Hlm 54

<sup>4</sup> Simatupang.M. 2004. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Edisi Ketiga. Yogyakarta. Hlm 28

<sup>5</sup> Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan : Problematikan dan Pendekatan*. Edisi Pertama, Jakarta : Salemba Empat. Hlm27

- Perkembangan GDP/GNP yang terjadi dalam suatu negara ditemani oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya (transformasi struktural).

Usaha-usaha pembangunan yang sedang giat dilaksanakan oleh negara-negara sedang berkembang (developing countries) di dunia pada umumnya berorientasi kepada bagaimana memperbaiki atau mengangkat tingkat hidup masyarakat di negara-negara tersebut supaya mereka bisa hidup seperti masyarakat di negara-negara maju.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang seakan-akan menjadi semacam kunci keberhasilan suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup warga negaranya.<sup>6</sup> Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu negara yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produksi. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi itu sendiri.<sup>7</sup>

### **Pengembangan Sektor pertanian**

Sistem pertanian merupakan suatu kegiatan yang berbasis keunggulan sumber daya alam yang erat kaitannya dengan penerapan teknologi dan keunggulan sumber daya manusia bagi perolehan nilai tambah yang lebih besar. Selain itu, agribisnis merupakan kegiatan yang memiliki beranekaragam kegiatan dengan spektrum yang sangat luas, dari skala usaha kecil, rumahan hingga skala usaha yang lebih besar, dari yang berteknologi sederhana hingga yang paling modern, yang semuanya itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Said dan Haritz mengatakan bahwa agribisnis adalah keseluruhan operasi yang terkait dengan aktivitas untuk menghasilkan dan mendistribusikan input produksi, produksi usahatani, dan pengolahan serta pemasaran.<sup>8</sup>

Dalam usaha pengembangan sektor pertanian terutama dihadapkan dengan kondisi petani yang serba lemah dan kekurangan (modal, skill, pengetahuan dan penguasaan lahan) dapat ditempuh dengan jalur penerapan sistem pengembangan pertanian atau agribisnis. Dalam konteks ini, yang dimaksud sistem pengembangan agribisnis yaitu suatu bentuk atau model atau pola pengembangan yang mampu memberikan keuntungan layak bagi pelaku atau petani, berupa peningkatan pendapatan, peningkatan nilai tambah dan perluasan kerja.

### **Peran Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi**

Kedudukan sektor pertanian dalam tatanan perekonomian nasional kembali memegang peranan cukup penting. Pada sektor perekonomian lainnya mengalami penurunan akibat krisis ekonomi dan moneter yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Kondisi ini memberikan kenyataan bahwa sektor pertanian merupakan bagian dari sumber daya pembangunan yang potensial untuk dijadikan sebagai sektor yang strategis untuk perencanaan pembangunan nasional maupun perencanaan pembangunan tingkat regional atau daerah saat ini dan kedepannya, melalui program pembangunan jangka pendek, menengah maupun dalam program pembangunan jangka panjang.

Konsep dasar dari pentingnya pertanian sebagai sektor pemimpin di dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pernyataan berikut: sektor andalan perekonomian adalah yang memiliki ketangguhan tinggi. Sektor andalan merupakan tulang punggung dan mesin

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 29

<sup>7</sup> Simatupang, M. 2004. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Edisi Ketiga. Yogyakarta. Hlm 30

<sup>8</sup> Said, E Gumbira dan Haritz Intan. 2004. *Manajemen Agribisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

penggerak perekonomian sehingga dapat pula di sebut sebagai sektor kunci atau sektor pemimpin perekonomian nasional.

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian besar anggota masyarakat di negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian tersebut. Jika para perencana dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, maka satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakatnya yang hidup di sektor pertanian.

Secara tradisional, peran pertanian dalam perkembangan ekonomi hanya dipandang pasif sebagai unsur penunjang. Peran utama pertanian hanya di anggap sebagai sumber tenaga kerja dan dan sektor penghasil bahan--bahan pangan. Adapun peran sektor pertanian dalam perkembangan ekonomi di Indonesia yaitu:<sup>9</sup>

1. Sebagai sektor penghasil bahan pangan
2. Sebagai sumber tenaga kerja bagi sektor ekonomi lain
3. Sebagai salah satu penghasil sumber devisa bagi negara
4. Meningkatkan permintaan akan produk industri dan dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan tersier.

Selain itu menurut Saragih (2000) mengatakan bahwa peranan agribisnis dalam ekonomi Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut ini.<sup>10</sup>

1. peranan agribisnis dalam pembentukan PDB. Sampai saat ini non-migas menyumbang sekitar 90 persen PDB, dan agribisnis merupakan penyumbang terbesar dalam PDB non-migas;
2. peranan agribisnis dalam penyerapan tenaga kerja. Karakteristik teknologi yang digunakan dalam agribisnis bersifat akomodatif terhadap keragaman kualitas tenaga kerja, sehingga tidak mengherankan agribisnis menjadi penyerap tenaga kerja nasional yang terbesar. Pada tahun 1987 sekitar 78 persen tenaga kerja berada di bidang agribisnis, dimana sektor pertanian menjadi penyerap yang terbesar, yaitu 55 persen.
3. peranan agribisnis dalam perolehan devisa. Selama ini selain ekspor migas, hanya agribisnis yang mampu memberikan net-ekspor secara konsisten;
4. peranan agribisnis dalam penyediaan bahan pangan. Ketersediaan berbagai ragam dan kualitas pangan dalam jumlah pada waktu dan tempat yang terjangkau masyarakat merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan di Indonesia.
5. peranan agribisnis dalam mewujudkan pemerataan hasil pembangunan (*equity*). Pemerataan pembangunan sangat ditentukan oleh 'teknologi' yang digunakan dalam menghasilkan output nasional, yaitu apakah bias atau pro terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rakyat banyak; dan
6. peranan agribisnis dalam pelestarian lingkungan. Kegiatan agribisnis yang berlandaskan pada pendayagunaan keanekaragaman ekosistem di seluruh tanah air memiliki potensi melestarikan lingkungan hidup.

### **Syarat Pembangunan Pertanian**

Pembangunan pertanian yang berorientasi agribisnis perlu didorong agar semakin cepat tumbuh dalam upaya pembangunan ekonomi yakni peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Mosher (1966: dalam Krisnandhi dan Bahrin, 1973) mengatakan bahwa terdapat

---

<sup>9</sup> Mi`Rojun Nurun Nadziroh, Peran Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Magetan, Jurnal AGRISTAN, Volume 2, Nomor 1, Mei 2020 hlm. 55

<sup>10</sup> Saragih, B. 2000. Agribisnis Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Dalam Era Millenium Baru. *Jurnal Studi Pembangunan, Kemasyarakatan & Lingkungan*, Vol 2, No.1/Feb. 2000, 1-9

syarat-syarat pembangunan pertanian di banyak negara dan menggolongkannya menjadi syarat-syarat mutlak fans syarat pelancar. Terdapat lima syarat yang harus ada dalam pembangunan ekonomi di sektor pertanian yaitu:<sup>11</sup>

1. Adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani;
2. Teknologi yang senantiasa berkembang;
3. Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksisecara lokal;
4. Adanya perangsang produksi bagi petani; dan
5. Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu.

### **Kebijakan sektor pertanian di Indonesia**

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan utama yang harus dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Hal itu didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Pertama, Indonesia mempunyai potensi alam yang dapat dikembangkan sebagai lahan pertanian, Kedua, sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan yang mata pencahariannya di sektor pertanian. Ketiga, perlunya induksi teknologi tinggi dan ilmu pengetahuan yang dirancang untuk mengembangkan pertanian tanpa mengakibatkan kerusakan. Keempat, tersedianya tenaga kerja sektor pertanian yang cukup melimpah. Kelima, ancaman kekurangan bahan pangan yang dapat dipenuhi sendiri dari produk dalam negeri, sehingga tidak harus tergantung pada produk-produk pertanian luar negeri yang suatu ketika harganya menjadi mahal.<sup>12</sup>

Tujuan Kebijakan Pertanian menurut Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dll adalah sebagai berikut:1) Memajukan pertanian, 2) Mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, 3) Meningkatnya produksi & efisiensi produksi, 4) Tingkat pendapatan petani meningkat, 5) Tingkat kesejahteraan petani dan masyarakat meningkat.

Kebijakan pemerintah pada sektor pertanian diperlukan karena beberapa hal, yaitu: Untuk stabilisasi harga input dan output dan kegagalan pasar timbul karena eksternalitas. Beberapa bentuk intervensi pemerintah seperti pajak, subsidi, pengawasan regulasi perlu ditetapkan sehingga biaya penerimaan akan sepenuhnya menggambarkan biaya eksternalitas.

Kebijakan pemerintah Indonesia di sektor pertanian mencakup beberapa hal, diantaranya:<sup>13</sup>

#### **1. Kebijakan Harga**

Tujuan dari kebijakan harga ini adalah mengurangi ketidakstabilan harga dan pendapatan, memberikan manfaat kepada konsumen karena terjaminnya penawaran dan mencukupi kebutuhan bahan baku industri, meningkatkan swasembada pangan sehingga mengurangi ketergantungan impor, menghemat devisa, dan memperbaiki neraca pembayaran, serta menjaga stabilitas politik.

#### **2. Kebijakan perdagangan**

Kebijakan perdagangan merupakan suatu pembatasan yang diberlakukan pada impor dan ekspor suatu komoditas. Untuk impor dengan pemberlakuan tarif impor dan kuota impor untuk membatasi jumlah yang diimpor dan meningkatkan harga domestik di atas harga dunia. Sedangkan untuk ekspor dengan pajak ekspor dan kuota ekspor untuk membatasi barang yang di ekspor dan mengkondisikan harga domestik yang lebih

---

<sup>11</sup> Krisnandhi dan Bahrin. S. 1973. Menggerakkan dan Memban- gun Pertanian. Jakarta: CV. Yasaguna (penyadur) dari

Mosher, AT. 1966. Getting Agriculture Moving. New York: Frederick A. Praeger, Inc. Publisher.

<sup>12</sup> Rossi Prabowo, Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia, Jurnal ilmu Pertanian, Vol 6. No 2, 2010

<sup>13</sup> Rikky Herdiansyah, Kebijakan Pemerintah dalam Ekonomi Pertanian. PPT.

rendah dari harga dunia. Tujuan kebijakan perdagangan yaitu untuk menghambat atau memperlancar pemasaran komoditi dari suatu wilayah ke wilayah yang lain.

3. Kebijakan Subsidi  
Meliputi kebijakan subsidi bagi petani, misalnya subsidi pupuk. Subsidi bagi agroindustri, misalnya subsidi minyak tanah, BBM.
4. Kebijakan Struktural  
Seperti kebijakan perbaikan prasarana pertanian, pengenalan teknologi pertanian, penyuluhan pertanian, dan pengudahaan alat-alat pertanian.
5. Kebijakan Pengaturan  
Pelaksanaan kekuatan kebijaksanaan pemerintah dengan menggunakan UU, peraturan, ketetapan yang berkenaan dengan perekonomian dan niaga
6. Kebijakan Fasilitas
  - investasi dan kredit
  - Pengadaan fasilitas penyimpanan
  - layanan informasi dan berita pasar
  - penelitian tataniaga
  - pendidikan dan penyuluhan tataniaga
7. Kebijakan Intervensi  
Pemerintah ikut secara langsung dalam masalah-masalah pemasaran barang-barang yang dianggap penting bagi kesejahteraan penduduk. Tujuan dari kebijakan intervensi yaitu melindungi produsen dan kons. BULOG, PN Garam.

## **PENUTUP**

Pembangunan memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional suatu negara. hingga saat ini masih banyak terdapat kendala-kendala dalam mewujudkan tujuan pembangunan pertanian sehingga kondisi petani sebagai pelaku utama belum menggembirakan atau sejahtera kehidupannya sehingga keluarga mereka enggan untuk bertani lagi. Guna mempercepat pembangunan ekonomi melalui sektor pertanian maka diperlukan adanya upaya untuk memenuhi syarat pokok atau mutlak dalam pembangunan yang telah dipaparkan di awal.

Selain itu, guna mengembangkan dan memajukan pembangunan ekonomi di sektor pertanian dibutuhkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Tujuan Kebijakan Pertanian menurut Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dll adalah sebagai berikut: 1) Memajukan pertanian, 2) Mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, 3) Meningkatkan produksi & efisiensi produksi, 4) Tingkat pendapatan petani meningkat, 5) Tingkat kesejahteraan petani dan masyarakat meningkat.

Beberapa hal kebijakan pemerintah di sektor pertanian yaitu: 1) Kebijakan harga; 2) kebijakan perdagangan; 3) kebijakan subsidi; 4) kebijakan struktural; 5) kebijakan pengaturan; 6) kebijakan fasilitas; 7) kebijakan intervensi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Krisnandhi dan Bahrin. S. 1973. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. Jakarta: CV. Yasaguna (penyadur) Made Wijaya, Mempercepat Pembangunan Pertanian: Kajian Teoritis. dwijenArgo Vol. 3 No. 2
- Mosher, AT. 1966. Getting Agriculture Moving. New York: Frederick A. Praeger, Inc. Publisher.
- Nadziroh, Mi'Rojun Nurun. Peran Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Magetan, Jurnal AGRISTAN, Volume 2, Nomor 1, Mei 2020
- Ramlawati, Peranan Sektor Pertanian Dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan. Vol. 1 No.

2 2020

- Rikky Herdiansyah, Kebijakan Pemerintah dalam Ekonomi Pertanian. PPT.
- Ropingi. 2002. *Identifikasi Komponen Pertumbuhan Sektor Pertanian*. Surakarta : Pradya Paramitha.
- Rossi Prabowo, Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia, Jurnal ilmu Pertanian, Vol 6. No 2, 2010
- Said, E Gumbira dan Haritz Intan. 2004. Manajemen Agribisnis. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saragih, B. 2000. Agribisnis Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Dalam Era Millenium Baru. *Jurnal Studi Pembangunan, Kemasyarakatan & Lingkungan, Vol 2, No.1/Feb. 2000, 1-9*
- Simatupang.M. 2004. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Edisi Ketiga. Yogyakarta.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan : Problematikan dan Pendekatan*. Edisi Pertama, Jakarta : Salemba Empat.